

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2021



Jl. Pos No. 15 Tanjungpinang

 **0771 450 1455**

www.danamuliasejahtera.com

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Pos No.15 Tanjungpinang

Nomor Telepon : (0771)4501455

Penjelasan Umum : Berdasarkan hasil analisis self assessment penerapan tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2021 dapat disampaikan kesimpulan umum sebagai berikut : 1. Secara keseluruhan hasil self assessment penerapan tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menunjukkan predikat "Baik" namun dalam pelaksanaannya masih ada faktor tata kelola yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan yang ada; 2. Penerapan fungsi yaitu budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jenjang organisasi agar dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola; 5. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK; 6. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menerapkan manajemen risiko namun masih belum menjalankan sepenuhnya secara efektif; 7. Pada Semester II tahun 2021 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera hanya menerapkan manajemen risiko untuk 3 risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan; 8. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan; 9. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK; 10. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menyusun dan menyampaikan rencana bisnis BPR termasuk perubahan rencana bisnis BPR secara tepat waktu kepada OJK. Sejalan dengan pengembangan usahanya, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera akan tetap berkomitmen dalam pelaksanaan penerapan tata kelola dan melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan penerapan tata kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kanto	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya; 5. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko; 6. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain; 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 10. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan; 11. Bertindak sebagai pemutus kredit.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Wei Kiong	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	<p>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya; 3. Menerapkan prinsip tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya; 5. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko; 6. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain; 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS; 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 10. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 11. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan/atau otoritas lain; 13. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit terkait tentang peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 14. Melaporkan kepada Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai; 15. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi lain.</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Dony & Ramli untuk pelaksanaan pemeriksaan audit atas semua Laporan Keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk posisi tahun buku 2021; 2. Menjaga rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return on Assets), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (Non Performing Loan) dan Cash Ratio dengan baik; 3. Meningkatkan penyaluran dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; 4. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui dan/atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 5. Menurunkan rasio NPL (Non Performing Loan) dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan tingkat kesehatan bank; 7. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank; 8. Melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan baru; 9. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau instansi lainnya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi telah melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mulia Pamadi	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 4. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya; 6. Memberitahukan kepada OJK mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 4 kali dalam setahun; 8. Dalam hal diperlukan oleh OJK, wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap BPR kepada OJK; 9. Melaksanakan pedoman dan tertib kerja anggota Dewan Komisaris; 10. Apabila seluruh anggota Direksi BPR diberhentikan sementara dan BPR tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus BPR.
2	Tonny David	Komisaris	1. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR; 4. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya; 6. Memberitahukan kepada OJK mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 4 kali dalam setahun; 8. Dalam hal diperlukan oleh OJK, wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap BPR kepada OJK; 9. Melaksanakan pedoman dan tertib kerja anggota Dewan Komisaris; 10. Apabila seluruh anggota Direksi BPR diberhentikan sementara dan BPR tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Dony & Ramli untuk pelaksanaan pemeriksaan audit atas semua Laporan Keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk posisi tahun buku 2021; 2. Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return on Assets), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (Non Performing Loan) dan Cash Ratio dapat dijaga dengan baik; 3. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; 4. Penyaluran kredit diperhatikan agar tidak melampaui dan/atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 5. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL (Non Performing Loan); 6. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan tingkat kesehatan bank; 7. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank; 8. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan baru; 9. Merekomendasikan kepada Direksi agar segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau instansi lainnya.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi agar dapat dilaksanakannya dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Modal Inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera masih kurang dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Wei Kiong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kanto	Tidak ada	Tidak ada	Ibu A Moi - Menantu
2	Wei Kiong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bp. Kanto adalah menantu dari Ibu A Moi selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham lain di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Sedangkan Bp. Wei Kiong tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mulia Pamadi	2.800.000.000	35,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bp. Mulia Pamadi memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan nominal Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan Bp. Tonny David tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mulia Pamadi	PT. BPR Dana Central Mulia	75,00
2	Mulia Pamadi	PT. Putra Bumi Sriwijaya	80,00
3	Mulia Pamadi	PT. Mulia Realty Link	75,00
4	Mulia Pamadi	PT. Mulia Realty Batindo	70,00
5	Mulia Pamadi	PT. Indotekon Batindo	60,00
6	Mulia Pamadi	PT. Mytecon Batindo	40,00
7	Mulia Pamadi	PT. Pilar Realty Batindo	50,00
8	Mulia Pamadi	PT. Graha Fantasy Propertindo	33,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bp. Tonny David tidak memiliki kepemilikan di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mulia Pamadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Tonny David	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mulia Pamadi	Tidak ada	Tidak ada	Bp. Filsafat Pang - Saudara Kandung
2	Tonny David	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bp. Mulia Pamadi adalah adik kandung dari Bp. Filsafat Pang selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham lain PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Sedangkan Bp. Tonny David tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	420000000	2	300000000
2	Tunjangan	2	404670000	2	277269000
3	Tantiem	2	102419998	2	81935991
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		927089998		659204991

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil RUPS tanggal 11 Januari 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	2 unit mobil dinas (2 orang)	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki fasilitas lain yaitu berupa 2 (dua) unit mobil dinas untuk 2 (dua) orang. Sedangkan seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki fasilitas lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,40	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,40	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,40	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,50	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	04-01-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Desember 2020; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
2	10-02-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Januari 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
3	09-03-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Februari 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
4	12-04-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Maret 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
5	10-05-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan April 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
6	11-06-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Mei 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
7	12-07-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Juni 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
8	16-08-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Juli 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
9	10-09-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Agustus 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
10	15-10-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan September 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
11	11-11-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan Oktober 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.
12	13-12-2021	2	Rasio CAR, ROA, BOPO, NPL dan Cash Ratio pada posisi bulan November 2021; Hasil temuan dari Internal Audit; Penerapan Kepatuhan; Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola; Penerapan program APU PPT.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021, seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Mulia Pamadi	12	0	100,00
2	Tonny David	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menghadiri rapat secara fisik sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak pernah terjadi penyimpangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak ada permasalahan hukum baik itu secara perdata ataupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat ataupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak terdapat adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Mulia Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210801	Kegiatan Sosial	Memberikan bantuan untuk kegiatan pembagian sembako gratis untuk warga kurang mampu yang diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.

Nama BPR	: PT BPR Dana Mulia Sejahtera
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Pos No.15 Tanjungpinang
Nomor Telepon	: 07714501455
Modal Inti BPR	: 9.247.038.873,00
Total Aset BPR	: 147.469.446.653,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,5
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian penerapan tata kelola, BPR memperoleh nilai komposit 2.5 dengan predikat komposit Baik. Hal ini tercermin dari : 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, meliputi : Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau PE pada bank lain, BPR memiliki kebijakan tentang benturan kepentingan, BPR memiliki PE yang menangani fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, BPR telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam penugasan KAP, BPR memiliki pedoman kebijakan kredit yang memadai secara tertulis yang terkait dengan BMPK, BPR telah menyusun RBB sesuai dengan visi dan misi BPR, BPR memiliki CBS yang cukup memadai. 2. Proses Penerapan Tata Kelola, meliputi : Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali dalam setahun, PEAI telah melaksanakan fungsi audit intern secara memadai dan independen, BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan RBB dengan baik, Laporan keuangan publikasi dan tahunan BPR telah disusun dan dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK, BPR telah menerapkan manajemen risiko namun masih belum sepenuhnya menjalankan secara efektif dan hanya menerapkan 3 risiko (risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko operasional). 3. Hasil Penerapan Tata Kelola, meliputi : BPR tidak pernah terjadi benturan kepentingan, BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK, BPR senantiasa melakukan upaya untuk menciptakan budaya kepatuhan agar dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan OJK dan/atau ketentuan perundang-undangan lain, BPR menyampaikan laporan penerapan tata kelola secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR, PEAI secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA
TAHUN 2021

Tanjungpinang, 18 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh :


Kanto
Direktur Utama



Mulia Pamadi
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Dana Mulia Sejahtera
Alamat : Jl. Pos No.15 Tanjungpinang
No Telp : 0771-4501455
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Modal Inti : Rp.9.247.038.873,-
Total Aset : Rp.147.469.446.653,-
Status Audit : Sudah Diaudit
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 2,5
Peringkat Komposit : Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis self assessment penerapan tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2021 dapat disampaikan kesimpulan umum sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan hasil self assessment penerapan tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menunjukkan predikat "Baik" namun dalam pelaksanaannya masih ada faktor tata kelola yang harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan dan kekurangan yang ada;
2. Penerapan fungsi yaitu budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jenjang organisasi agar dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola;
5. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak melanggar dan/atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
6. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menerapkan manajemen risiko namun masih belum menjalankan sepenuhnya secara efektif;
7. Pada Semester II tahun 2021 PT. BPR Dana Mulia Sejahtera hanya menerapkan manajemen risiko untuk 3 (tiga) risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan;

8. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera memiliki kebijakan tentang pengaturan benturan kepentingan;
9. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
10. PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menyusun dan menyampaikan rencana bisnis BPR termasuk perubahan rencana bisnis BPR secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejalan dengan pengembangan usahanya, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera akan tetap berkomitmen dalam pelaksanaan penerapan tata kelola dan melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan penerapan tata kelola.

Tanjungpinang, 18 April 2022


Kanto
Direktur Utama



Mulia Pamadi
Komisaris Utama